

**OPINI PUBLIK TENTANG PENGGUNAAN KOTAK  
SUARA KARDUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**(STUDI DESKRIPTIF KUANTITATIF PADA MASYARAKAT TANJUNG  
MULIA KECAMATAN MEDAN DELI)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**VINKAN DWI AGUSTIN**

**NPM: 1503110054**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
KONSENTRASI HUBUNGAN MASYARAKAT**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **VINKAN DWI AGUSTIN**  
NPM : 1503110054  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul : **OPINI PUBLIK TENTANG PENGGUNAAN KOTAK SUARA KARDUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (STUDI DESKRIPTIF KUANTITATIF PADA MASYARAKAT TANJUNG MULIA KECAMATAN MEDAN DELI)**

Medan, 18 Maret 2019

Dosen Pembimbing

  
**Dr. YAN HENDRA, M.si.**

Disetujui Oleh

  
**Ketua Program Studi**

**NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M. I.Kom**

Dekan,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

## PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
oleh:

Nama Lengkap : **VINKAN DWI AGUSTIN**

N P M : 1503110054

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Waktu : Pukul 08.45 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom**

PENGUJI II : **Drs. BAHRU M JAMIL, MAP**

PENGUJI III : **Dr. YAN HENDRA, M.Si.**

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., MSP**

**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**





Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : VINYAN DWI AGUSTIN  
N P M : 1503110054  
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI  
Judul Skripsi : OPINI PUBLIK TENTANG PENGGUNAAN KOTAK SURSA FARDUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	15 Agustus 2019	Bimbingan Bab I, II, III	
2.	20 Agustus 2019	Bimbingan kuisisioner	
3.	29 Agustus 2019	ACC Angket pertanyaan	
4.	23 Sept 2019	Bimbingan Bab IV	
5.	25 Sept 2019	Revisi Bab IV	
6.	28 Sept 2019	Bimbingan Bab V	
7.	30 Sept 2019	Revisi Bab V, Abstrak	
8.	30 Oktober 2019	ACC skripsi	

Medan, .....20.....

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALIH, S.Sos, M.SP)

Ketua Program Studi,

(NURHASANAH, M.ST, S. Sos, M. I. Kom)

Pembimbing ke : .....

(Dr. YAN HENDRA, M.S.i)

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, VINKAN DWI AGUSTIN, NPM 1503110054, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya sedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2019

menyatakan



**6000**  
ENAM RIBURUPIAH

VINKAN DWI AGUSTIN

**Opini Publik Tentang Penggunaan Kotak Suara Kardus Oleh Komisi  
Pemilihan Umum  
( Studi Deskriptif Pada Masyarakat Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli )**

**Vinkan Dwi Agustin  
1503110054**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan kotak suara dari kardus dalam pemilihan umum presiden tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan umum presiden tahun 2019. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang komunikasi, komunikasi politik, komunikasi massa, opini publik, pemilihan umum dan komisi pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat lingkungan XII tanjung mulia kecamatan medan deli. Pengumpulan data digunakan dengan menyebarkan angket, sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tabulasi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum cenderung negatif.

**Kata Kunci: Opini Publik, Kotak Suara, Pemilihan Umum**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat beriring salam penulis berikan risalah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang.

Penulis menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “ **Opini Publik Tentang Penggunaan Kotak Suara Kardus Oleh Komisi Pemilihan Umum. ( Studi Deskriptif Pada Masyarakat Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli )** ”

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha, bantuan dari berbagai pihak yang akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Rajali dan Ibunda Awaliati, serta kepada Kakak Vanni Shavira dan Adik Wiranti, yang telah memberikan

dorongan, semangat, serta cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr Arifin Saleh. S, sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos. M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Yan Hendra., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah berperan besar dalam memberikan waktu, kesempatan, ilmu dan arahnya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staff BIRO Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah membantu dalam menyelesaikan segala berkas administrasi yang dibutuhkan selama perkuliahan.
9. Masyarakat Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.



10. Terima kasih juga kepada Teman-teman seperjuangan, Wiri Ariana, Nur Indah, Suvia Agustin, Dinda Audelia, Nurul Aulia Putri, Nurul Wisuda Yanti, Ali Nafiza, Rahmad Hidayat dan masih banyak lagi yang selalu bersama menunggu dosen bimbingannya masing-masing.
11. Terima Kasih untuk teman satu bimbingan saya Ichwanul Hidayat, Siti Khadijah, Shafrian Arizi yang saling menyemangati satu sama lain dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada teman-teman kelas IKO A Sore dan IKO C Humas sore, dan seluruh keluarga besar stambuk 2015 Ilmu Komunikasi FISIP UMSU.
13. Dan terakhir terima kasih kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah, penulisan skripsi ini penulis buat agar bermanfaat bagi semua, penulis mengucapkan terimakasih.

*Wasalammu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Medan , Oktober 2019

Penulis

**Vinkan dwi agustin**  
**NPM : 1303110054**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Pembatasan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penelitian .....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>6</b>
2.1 Komunikasi .....	6
2.1.1 Pengertian Komunikasi .....	6
2.1.2 Tipe Komunikasi .....	6
2.1.3 Strategi Komunikasi .....	7
2.1.4 Unsur-unsur Komunikasi .....	9
2.1.5 Fungsi Komunikasi .....	11
2.1.6 Proses Komunikasi .....	12
2.1.7 Prinsip-Prinsip Komunikasi .....	13

2.2 Opini Publik .....	14
2.2.1 Pengertian Opini Publik.....	14
2.2.2 Karakteristik Dan Fungsi Opini Publik .....	16
2.2.3 Sikap Individu Terhadap Opini Publik.....	21
2.2.4 Mengubah Dan Membentuk Opini Publik.....	23
2.2.5 Media Massa Sebagai Pembentuk Opini Publik .....	24
2.2.6 Unsur-Unsur Opini Publik .....	26
2.3 Komisi Pemilihan Umum.....	27
2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	27
2.4 Pemilihan Umum.....	27
2.4.1 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden .....	29
2.4.2 Pemilihan Umum Serentak .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Kerangka Konsep.....	38
3.3 Definisi Konsep.....	39
3.4 Operasionalisasi Konsep.....	40
3.5 Populasi Dan Sampel .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	44

4.1.1 Penyajian Data.....	44
4.1.2 Identitas Responden.....	44
4.2 Pembahasan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2 Penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus dinilai cukup memuaskan	45
Tabel 4.3 Kotak suara kardus sudah dianggap layak oleh masyarakat	46
Tabel 4.4 Kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan	47
Tabel 4.5 Penggunaan kotak suara kardus dinilai sudah cukup aman	48
Tabel 4.6 kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap air	48
Tabel 4.7 Penggunaan kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi	49
Tabel 4.8 Kotak suara kardus tidak berkualitas	50
Tabel 4.9 Penggunaan kotak suara kardus berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat	51
Tabel 4.10 Komisi pemilihan umum telah memaksimalkan kinerja mereka pada pemilihan umum 2019	52
Tabel 4.11 Penggunaan kotak suara kardus tidak menurunkan derajat kualitas komisi pemilihan umum	53
Tabel 4.12 Penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu	54
Tabel 4.13 Kotak suara berbahan dasar kardus dapat digunakan untuk jangka panjang	55
Tabel 4.14 Sebaiknya kembali menggunakan kotak suara berbahan dasar aluminium	56



Tabel 4.15 Pemerintah terlalu membatasi hak suara masyarakat dalam memilih kotak sua	57
Tabel 4.16 Pemilihan kotak suara kardus dilatar belakangi oleh kepentingan satu golongan	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 .....	38
------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang dan untuk memilih jabatan-jabatan politik tertentu. Proses tersebut kita kenal sebagai pemilihan umum (pemilu), pemilihan umum menjadi penting karena pemilihan umum merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik suatu negara.

Di Indonesia sendiri diketahui bahwa pemilu Presiden diadakan selama lima tahun sekali, namun sebelum itu prosesnya sempat tidak teratur seperti sekarang. Pemilihan umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 hingga sekarang.

Namun publik dikejutkan dengan hebohnya pemberitaan di media massa tentang persoalan kualitas kotak suara pemilu berbahan dasar kardus yang digunakan pada 17 April 2019 lalu di tempat pemungutan suara. Sesuai dengan pasal 341 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengamanatkan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Keputusan komisi pemilihan umum atau biasa disebut KPU menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilihan umum tahun 2019 menuai perdebatan. Kotak suara tersebut dinilai tidak kuat dan membuka potensi terjadinya

kecurangan dalam pemilu. Padahal, kotak suara jenis ini sudah digunakan sejak lima tahun lalu dan disetujui oleh pemerintah dan parlemen.

Protes tersebut bukan hanya asumsi semata, namun polemik ini dibuktikan berdasarkan fakta yang bermula dari adanya masalah kotak suara yang dikirimkan ke beberapa wilayah. Sebanyak 70 kotak suara yang diterima oleh komisi pemilihan umum Bantul, Jawa Tengah, rusak karena basah saat pengiriman beberapa hari lalu. Sebelumnya, 11 Desember 2018, sebanyak 2.065 unit kotak suara dan 110 bilik suara juga rusak karena terkena banjir di Badung, Bali.

Berdasarkan fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan ungkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatakan bahwa kotak suara tersebut kedap terhadap air di mana kotak suara yang terkena banjir tersebut rusak dan tidak dapat digunakan. Fakta tersebut menjadi kekhawatiran publik di mana tak banyak dari mereka (publik) meragukan kecurangan yang akan terjadi pada pemilihan umum 2019.

Kotak suara berbahan kardus sudah digunakan sebagian pada pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2014. Selanjutnya, digunakan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015, 2016, 2017 dan 2018. Saat ini kotak suara kardus digunakan untuk menggantikan kotak suara kaleng atau aluminium yang hilang dan rusak.

Di tengah pro-kontra, komisi pemilihan umum menjamin penggunaan kotak suara kardus tak menurunkan derajat kualitas pemilihan umum. ketua komisi pemilihan umum Arief Budiman menjamin keamanan kotak suara. kardus yang digunakan menurut dia, kedap air, tak Cuma itu, Arief menjamin kekuatan

kotak suara terhadap tekanan. “ini menahan bobot berat barat badan saya (orang dewasa) saja kuat.”

Berdasarkan uraian permasalahan di atas fakta kotak suara yang berbahan dasar kardus ini hangat diperbincangkan di tengah masyarakat sehingga penulis tertarik untuk meneliti “ **opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum pada masyarakat tanjung mulia kecamatan medan deli.**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:“Bagaimana opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum pada masyarakat Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli.”

## 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas, maka penelitian ini hanya dilakukan untuk mengetahui“**opini masyarakat Lingkungan XII Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Pada Pemilih Pemula Usia 17 Tahun**”.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum.



### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. Selain itu proses penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses latihan peneliti untuk dapat berfikir logis dan sistematis dalam bidang Komunikasi pada umumnya dan bidang ilmu politik pada khususnya.

b. Secara Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan bagi mahasiswa yang juga akan melakukan penelitian terhadap opini masyarakat terhadap penggunaan kotak suara kardus di masa yang akan datang.

c. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bagian ini menguraikan tentang pengertian komunikasi, opini publik, komisi pemilihan umum dan pemilihan umum.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini berisikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan dan narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Komunikasi**

##### **2.1.1 Pengertian Komunikasi**

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti “sama”, *communico, communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama”(take make common). Istilah pertama (*communis*) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lain yang mirip (Mulyana, 2011.).

Onong Uchyana mengatakan komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran, atau perasaan oleh seorang (*communicator*) kepada orang lain (komunikan). komunikasi adalah proses dimana pihak-pihak saling menggunakan informasi dengan untuk mencapai tujuan bersama dan komunikasi merupakan kaitan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya.

Pada dasarnya komunikasi adalah upaya untuk melakukan interaksi dengan orang lain, dalam upaya untuk mempertahankan diri agar eksistensi diri terus terjaga di lingkungan tempat tinggal. Komunikasi menghendaki setiap individu terus berinteraksi dengan orang lain karena ingin menyampaikan keinginan diri agar diterima orang lain melalui pesan.

##### **2.1.2 Tipe komunikasi**

Seperti halnya defenisi komunikasi, klasifikasi tipe atau bentuk komunikasi di kalangan para pakar juga berbeda satusama lainnya. Klasifikasi itu

didasarkan atas sudut pandang masing-masing pakar menurut dan bidang studinya. Menurut Cangara (2004: 34-41) tipe komunikasi yaitu:

a. Komunikasi dengan Diri Sendiri (*Intrapersonal Communication*)

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi didalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi ini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap sesuatu objek yang di amatinya atau dalam pikirannya.

b. Komunikasi Antar Pribadi (*Interpersonal Communication*)

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antaradua orang atau lebih secara tatap muka.

c. Komunikasi Publik

Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi retorika, dan komunikasi khalayak. Komunikasi publik menunjukkan suatu proseskomunikasi dimana pesan-pesan di sampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar.

d. Komunikasi Massa

Komunikasi massa dapat didefenisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film.

### **2.1.3 Strategi Komunikasi**

Dalam konteks komunikasi, untuk menyusun strategi komunikasi ada empat faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

### 1. Mengenal Khalayak

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif. Sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling berhubungan, tapi juga saling mempengaruhi.

### 2. Menyusun Pesan

Setelah mengenal khalayak langkah selanjutnya ialah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Perhatian ialah pengamatan terpusat, karena itu tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian. Dengan demikian awal dari suatu efektifitas dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan *AA procedure atau from Attention to Action procedure*. Artinya membangkitkan (*Attention*) untuk selanjutnya menggerakkan seseorang atau orang banyak melakukan kegiatan (*Action*) sesuai tujuan yang dirumuskan.

### 3. Menetapkan Metode

Dalam hal ini metode penyampaian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: menurut cara pelaksanaannya dan menurut isinya. Menurut cara pelaksanaannya dan menurut isinya. Menurut cara pelaksanaannya, dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu metode *redundancy (repetition)* dan *canalizing*. Menurut bentuk isinya dikenal dengan metode informatif, persuasif, dan edukatif.



#### 4. Penetapan Media Komunikasi

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat menggabungkan salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik yang dipergunakan, karena masing-masing medium mempunyai kelemahan-kelemahan itu, pemanfaatan media radio sebagai alternatif strategi dakwah memerlukan perencanaan persiapan yang baik dengan memperhatikan faktor-faktor di atas agar memperoleh hasil yang optimal.

##### **2.1.4 Unsur-unsur Komunikasi**

Menurut Alo Liliweri (2011) terdapat beberapa unsur-unsur komunikasi:

###### 1. Pengirim/Sumber

Pengirim adalah orang yang membuat pesan. Dia merupakan pemrakarsa yang ingin menyajikan pikiran dan pendapat tentang suatu peristiwa atau objek. Sebagai pengirim pesan yang bertujuan tertentu, maka pengirim tidak selalu berada dalam posisi serba tahu atau serba kenal terhadap penerima, karena itu pengirim mentransmisi pesan untuk mendapat respon demi menyamakan persepsi terhadap pesan.

###### 2. Penerima

Penerima adalah orang yang menafsirkan pesan yang diucapkan atau ditulis Devito, 1986. Sama seperti informasi mengenai objek atau peristiwa, maka penerima tentu pernah mempunyai pengalaman sekecil apa pun terhadap pesan-pesan tertentu, yang bisa sama atau berbeda dengan pengirim. Ketika suatu pesan diterima, maka orang yang menerima menginterpretasi pesan-pesan ini kemudian dapat dikirim kembali kepada pengirim.

### 3. Encoding dan Decoding

*Encoding* adalah proses dimana pengirim menerjemahkan ide atau maksudnya kedalam simbol-simbol berupa kata-kata atau nonverbal. *Dicoding* adalah aktivitas seorang penerima pesan, yaitu menerjemahkan simbol-simbol verbal dan non verbal tadi kepada pesan yang bisa saja mirip, persis sama dengan, atau sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh pengirim.

### 4. Pesan

Pesan adalah gagasan, perasaan, atau pemikiran, yang telah di-*encode* oleh pengirim atau di-*decode* oleh penerima. Pada umumnya pesan-pesan berbentuk sinyal, simbol, tanda-tanda atau kombinasi dari semuanya dan berfungsi sebagai stimulus yang akan direspons oleh penerima.

### 5. Saluran

Saluran komunikasi merupakan sarana untuk mengangkut atau memindahkan pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam komunikasi, semua pesan yang dikirim harus melalui saluran, seperti melalui bahan cetakan/buku, email atau melalui telepon.

### 6. Noise

Komunikasi yang terjadi tidaklah selalu lancar, komunikasi sering mengalami hambatan atau gangguan. Shannon dan Weaver mengartikan konsep *noise* sebagai “kebisingan”.

### 7. Feedback

*Feedback* juga sering disebut umpan balik yaitu *respons* yang diberikan oleh penerima terhadap pesan yang akan dikirimkan oleh pengirim.

### 2.1.5 Fungsi Komunikasi

Menurut Harold D. Lasswell dalam Nurudin (2008), fungsi-fungsi komunikasi ialah sebagai berikut:

- a) Penjagaan/pengawasan lingkungan (*surveillance of the environment*). Fungsi ini dijalankan oleh para diplomat, etase dan koresponden luar negeri sebagai usaha menjaga lingkungan.
- b) Menghubungkan bagian- bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*). Fungsi ini diperankan oleh para editor, wartawan dan juru bicara sebagai penghubung respon internal.
- c) Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi (*transmission of the social heritage*). Fungsi ini adalah para pendidik di dalam pendidikan formal atau informal karena terlibat mewariskan adat kebiasaan, nilai dari generasi ke generasi.

Sementara itu, dalam teknik komunikasi menyatakan bahwa fungsi komunikasi ini adalah:

- a) Komunikasi merupakan alat suatu organisasi sehingga seluruh kegiatan organisasi itu dapat untuk mencapai tujuan tertentu.
- b) Komunikasi merupakan alat untuk mengubah perilaku pada suatu organisasi.

- c) Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota organisasi.

### **2.1.6 Proses Komunikasi**

Onong Ucjana Effendy (2006), proses komunikasi terbagi menjadi empat tahap, yakni:

#### 1. Proses komunikasi secara primer

Merupakan proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang (simbol) sebagai media atau saluran. Lambang ini umumnya bahasa, tetapi dalam situasi-situasi komunikasi tertentu lambang-lambang yang digunakan dapat berupa kial (*gesture*), yakni gerakan anggota tubuh, gambar, warna, dan lain sebagainya.

#### 2. Proses komunikasi secara sekunder

Merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.

#### 3. Proses komunikasi secara linier

Merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Proses komunikasi secara linier umumnya berlangsung pada komunikasi media. Karena komunikasi media, khususnya media masa, yakni surat kabar, radio, televisi, dan film para komunikator media masa seperti wartawan, penyiar radio, reporter, televisi, dan sutradara film menunjukkan perhatiannya terhadap permasalahan ini.

#### 4. Proses komunikasi secara sirkular

Merupakan terjadinya *feedback* atau umpan balikyaitu arus dari komunikan ke komunikator.

### 2.1.7 Prinsip-prinsip komunikasi

#### a. Konteks

Komunikasi yang bermakna akan sangat tergantung kepada cara menghubungkan dengan konteks pesan yang disampaikan. Konteks pesan tersebut akan dapat mempengaruhi orang lain dan akhirnya akan diterima tanpa paksaan.

#### b. Fokus

Agar komunikasi itu bermakna dan efektif perlu memperhatikan fokus tertentu. Fokus ini berguna agar penyampaian pesan tetap pada media yang digunakan.

#### 1. Sosialisasi

Komunikasi yang bermakna dan efektif tergantung pada hubungan antara komunikator dan komunikan serta kepada siapa komunikasi itu ditujukan. Sasaran ini perlu diketahui untuk memahami situasi dari sasaran tersebut.

#### 2. Individualisasi

Komunikasi yang bermakna tentunya perlu mengetahui sikap, kecakapan, dan kemampuan dari masing-masing komunikan secara individu atau kelompok. Biasanya individu atau kelompok tertentu mempunyai tradisi dan kekuasaan tertentu pula.



### 3. Unitas (*sequence*)

Untuk menjaga kelancaran proses komunikasi maka pesan-pesan harus disusun sedemikian rupa sehingga terlihat pesan yang perlu diberikan terlebih dahulu atau yang diutamakan, pesan-pesan tersebut perlu diketahui mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan atau ditentukan unit-unitnya, dan secara psikologis seorang komunikator mengetahui kemampuan dari khalayak yang dihadapi.

### 4. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian yang integral dari proses komunikasi, evaluasi merupakan umpan balik. Jadi dalam hal ini peran komunikator dan komunikasi sangat penting.

## **2.2 Opini publik**

### **2.2.1 Pengertian Opini Publik**

Opini publik asal kata dari bahasa Inggris *Public Opinion*. Menurut Djoenaesih S. Soenarjo (Wahid 2016:141), opini publik dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pendapat umum, dengan demikian publik diterjemahkan dengan umum sedangkan *opinion* dialihbahasakan dengan pendapat.

Opini publik adalah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok orang-orang (masyarakat). Pendapat lain menyebutkan bahwa opini publik mewakili suatu kesepakatan, dan kesepakatan dimulai dengan sikap orang-orang terhadap isu yang masih tanda tanya.

Lebih jauh, Seitel menyebutkan bahwa sikap didasarkan pada sejumlah karakteristik :

1. Personal, secara fisik, unsur emosional suatu individu termasuk kondisi, usia dan status sosial.
2. Cultural, lingkungan dan gaya hidup dalam area geografis tertentu, seperti Jepang berbeda dengan orang Amerika atau orang desa di Amerika berbeda dengan orang kotanya.
3. Pendidikan, tingkat dan kualitas pendidikan seseorang.
4. Familial (*people's root*), semacam akar rumput orang-orang.
5. Religi, suatu sistem kepercayaan tentang Tuhan atau supranatural.
6. Tingkat sosial, posisi dalam masyarakat. Perubahan status yang dimiliki orang-orang.
7. Ras, asal etnik/suku.

Komunikasi politik sangat terkait erat dengan opini publik. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi sebuah pencitraan yang dilakukan terlebih dalam konteks di mana pencitraan itu menggunakan media massa sebagai salah satu instrumen pendukungnya. Opini publik akan terbentuk ketika komunikator politik menyampaikan gagasan atau pesannya kepada publik. Wacana yang dibangun sedikit banyak akan menjadi bagian dari perbincangan publik sehingga terbentuk opini publik yang sangat beragam.

Menurut Ardial (Tabroni 2014:28), konsep opini publik bertitik tolak dari asasi yang ada pada diri manusia, yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatakan kehendak, ide atau gagasan.

### **2.2.2 Karakteristik dan Fungsi Opini Publik**

Opini publik merupakan refleksi dari perilaku manusia, baik sebagai aktor politik maupun khalayak politik. Pesan politik yang dikemas sebagai berita/informasi yang dipublikasikan melalui media massa, media baru (*new media*), dan media sosial (*social media*) mewakili rencana, tujuan, dan kepentingan actor politik, sekaligus mempertimbangkan secara serius setting peristiwa, keinginan, harapan, dan tujuan khalayak. Aktor atau pelaku politik tidak akan berhasil membentuk opini public jika tidak memikirkan kepentingan khalayak atau publik target politik. Pada era teknologi komunikasi yang melahirkan media baru dan media sosial, pertimbangan agenda khalayak menjadi sangat diperlukan karena khalayak dapat bebas mengakses informasi dari beragam media secara bebas. Fenomena the power of new media dan social media menurut aktor politik untuk mengelola khalayak sebaik mungkin dengan semua jenis media yang ada, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada era internet saat ini, proses komunikasi politik tidak mungkin mengabaikan keberadaan dan kekuatan media baru serta medial sosial.

Umumnya, pembicaraan politik dalam pembentukan opini publik dilakukan secara verbal. Kata-kata sebagai alat konstruksi realitas politik harus dikemas secara tepat dan sesuai karena bahasa memiliki kekuatan dalam mengonstruksi kekuasaan. Tanpa bahasa, realitas tidak akan mudah disampaikan kepada publik. Individu-individu adalah publik yang terlibat secara sadar sekaligus menjadi target pemasaran politik. Khalayak membutuhkan informasi yang jelas dan objektif sehingga mengenal serta mengetahui secara jelas kebijakan, program, dan actor

politik. Publik pun mempunyai hak untuk diinformasikan berbagai rencana dalam proses komunikasi politik.

Floyd Allport (Arifin, 2010:14), mengumpulkan 12 karakteristik opini publik, yaitu:

- a. Merupakan perilaku manusia individu-individu
- b. Dinyatakan secara verbal
- c. Melibatkan banyak individu
- d. Situasi dan objeknya dikenal secara luas.
- e. Penting untuk orang banyak.
- f. Pendukungnya bersedia untuk terlibat.
- g. Disadari, kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya
- h. Diekspresikan, sikap atau pendapat melibatkan ekspresi
- i. Pendukungnya tidak harus berada ditempat yang sama.
- j. Bersifat menentang atau mendukung sesuatu, adanya pro kontra.
- k. Mengandung unsure pertentangan sebagai upaya menuju tujuan bersama.
- l. Efektif untuk mencapai objektifitas dalam mencapai tujuan bersama.

Opini publik juga mempunyai sifat-sifat yang mencirikan proses pembentukan opini publik. Menurut Sunarjo (Wahid 2016:147), ciri-ciri ataupun sifat-sifat tersebut, yakni:

- a. Sederhana

Pesan politik pada pembentukan opini publik disampaikan dalam pernyataan atau bahasa yang sederhana agar khalayak atau publik dapat memahami pesan tersebut dengan mudah.

b. Labil

Opini publik sangat mudah berubah jika terdapat pesan politik baru yang memudahkan diterima oleh publik. Artinya, pesan opini publik bukan sesuatu yang menetap, melainkan terbuka untuk dipengaruhi oleh sumber komunikasi politik lainnya guna membentuk opini public yang baru.

c. Afinitas

Bahasa adalah alat yang paling kuat dan mudah dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Penggunaan struktur bahasa, gaya menulis, idiom-idiom, metafora, leksikon, serta huruf abjad yang dipakai dan menyajikan suatu berita menentukan efek yang muncul.

Lebih lanjut, Nimno (Wahid, 2016: 148) berpendapat opini publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik

Komunikasi politik, peristiwa, serta karakteristik dan tujuan opini publik adalah alasan sebuah pesan politik dikonstruksi serta dipublikasikan.

b. Terdapat kontroversi

Kontroversi menandai adanya opini publik yang tidak dipercayai oleh rakyat. Sebuah opini publik tidak selalu diterima bulat-bulat oleh masyarakat, melainkan sangat mungkin menimbulkan perdebatan karena perbedaan perspektif dalam banyak sektor di antara publik.

c. Mempunyai volume

Kontroversi yang terjadi menciptakan afiliasi kelompok yang sepakat dan mendukung sebuah isu yang diperdebatkan. Sedangkan yang kontra atau tidak

mendukung akan menjadi sebuah kelompok yang mengkritik, membantah, dan tidak mendukung isu yang menjadi perdebatan.

d. Relatif tetap walaupun dapat diubah dari positif ke negatif.

Opini publik cenderung bisa bertahan selama komunikator politik terus memelihara pesan-pesan tersebut dan khalayak menilai hal tersebut 'benar' serta setuju dengan pesan politik tertentu.

Dari definisi dan sifat-sifat opini publik tersebut, dapat dikemukakan bahwa:

- a. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa dapat mengubah opini publik seketika.  
Opini publik tidak akan stabil sebelum peristiwa tersebut menunjukkan perkembangan yang jelas.
- b. Opini publik sangat peka terhadap peristiwa penting.
- c. Opini pada umumnya lebih ditentukan oleh peristiwa daripada kata-kata, kecuali jika kata-kata tersebut suatu peristiwa.
- d. Pernyataan lisan dan tindakan penanggulangan hanya bisa dilakukan sebelum opini terbentuk. Hal lainnya terjadi juga pada saat orang-orang masih bimbang dan mencari keterangan dari sumber yang terpercaya.
- e. Pada umumnya, opini publik tidak mendahului kejadian, tetapi hanya bereaksi terhadap suatu kejadian atau keadaan.
- f. Opini mudah berubah, kecuali jika orang-orang merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar bersangkutan. Kemungkinan lainnya, opini publik dibangkitkan dengan kata-kata yang diperkuat dengan peristiwa nyata.

- g. Secara psikologis, opini pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan pribadi. Berbagai peristiwa, kata-kata, dan hal lain memengaruhi opini bila ada hubungannya dengan kepentingan pribadi dan lain-lain.
- h. Jika menyangkut kepentingan pribadi, opini publik tidak dapat diubah.
- i. Jika menyangkut kepentingan pribadi, opini publik dalam negara demokrasi cenderung mendahului atau bahkan mendikte kebijakan pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang.
- j. Jika suatu opini didukung mayoritas yang tidak kuat atau opini tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, peristiwa berikutnya mudah mengubah opini dan arah penerimaannya.
- k. Pada saat-saat kritis, setiap orang menjadi lebih peka terhadap kemampuan pemimpinnya. Bila mempunyai kepercayaan terhadapnya, mereka akan bersedia untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab daripada biasanya. Tetapi, bila kepercayaan mereka berkurang, toleransi mereka pun akan berkurang dari biasanya.
- l. Masyarakat biasanya segan untuk menentang keputusan yang telah diambil oleh pemimpinnya dalam keadaan kritis, apalagi bila merasa mereka diikut sertakan dalam pengambilan keputusan tersebut.
- m. Membentuk opini tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu tujuan tertentu lebih mudah dari membentuk opini mengenai metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu
- n. Opini publik, sama halnya dengan opini pribadi, mengandung suatu keinginan. Bila opini didasarkan pada keinginan saja, bukan pada suatu

penerangan, hal itu cenderung untuk menunjukkan perhatian yang besar pada suatu peristiwa.

- o. Semakin luas pengetahuan masyarakat tentang perkembangan kejadian dan gagasan mengenai kepentingannya sendiri, mereka semakin cenderung untuk melontarkan opini lebih yang objektif.

Opini publik mempunyai kekuatan membentuk kekuatan sosial, norm, sekaligus menghapus dan melanggengkan kekuasaan. Opini publik dapat memperkuat kebijakan dan undang-undang atau peraturan. Tanpa dukungan opini publik yang kuat, komunikator politik tidak akan mampu menjalankan perundang-undangan, kebijakan, dan program yang menjadi output dalam sistem politik. Opini publik merupakan pendukung moral dalam memelihara dan mempertahankan pengaruh serta kekuasaan bagi komunikator politik. Dengan dukungan media yang kuat, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih mudah.

### **2.2.3 Sikap Individu Terhadap Opini Publik**

Salah satu tujuan dibentuknya opini publik adalah membentuk citra positif atau negatif terhadap komunikator politik. Pembentukan citra positif oleh seseorang, kelompok, organisasi politik, dan organisasi masyarakat bertujuan memunculkan opini positif. Opini positif dan citra positif akan sangat menguntungkan komunikator politik. Pembentukan citra positif juga terjadi pada level personal.

Opini individu muncul sebagai akibat persepsi-persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Opini berdasarkan



penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda pandangannya terhadap suatu masalah. Opini itu bisa setuju dan tidak setuju, atau menimbulkan pro dan kontra. Dengan demikian, baru akan diketahui bahwa ada orang-orang yang sependapat dan tidak sependapat dengannya setelah dia memperbincangkan dengan orang lain. jadi, opini public merupakan perpaduan dari opini-opini individu.

Menurut Grunig & Repper (Wahid, 2016:153) keberhasilan opini publik ditentukan oleh sikap individu-individu dalam memaknai pesan pada pembentukan opini publik. Pesan yang disampaikan pada public politik tertentu menjadi tidak berarti sama sekali jika individu-individu yang menjadi bagian dari publik tidak memahami dan menyetujui pesan yang disampaikan komunikator politik. Oleh karenanya, mengonstruksi pesan sesuai dengan karakteristik dan kapasitas publik penerima pesan sangatlah penting. Berkaitan dengan sikap individu dalam memahami opini publik, terdapat beberapa pandangan mengenai sikap individu terhadap opini publik, yaitu:

#### 1. Orientasi

Orientasi adalah kecenderungan khalayak terhadap suatu pesan atas dasar pertimbangan dan kepentingan tertentu. Kecenderungan individu dalam memahami opini public mencakup persepsi terhadap isu atau objek yang sedang menjadi pembicaraan politik yang didukung oleh persepsi orang lain yang signifikan terhadap isu atau objek yang sama.

## 2. Koorientasi

Dalam pembentukan opini publik dibutuhkan banyak kesamaan penilaian terhadap sebuah isu. Koorientasi adalah keadaan individu ketika dua atau lebih orientasi individu mengarah pada isu atau objek yang sama.

### **2.2.4 Mengubah dan Membentuk Opini Publik**

Menurut Reinald Kasali, dalam buku Manajemen Publik Relation dan Aplikasinya di Indonesia (2000), pembentukan opini public dalam proses komunikasi politik mempunyai beberapa tahapan perkembangan:

#### 1. Proses waktu.

Pembentukan Opini Publik bukan aktivitas instan atau kerjaan satu dua hari, melainkan pekerjaan dengan perencanaan, pelaksanaan, proses pengolaan sumber daya manusia, budgeting, media, target khalayak atau public, control, dan evaluasi. Semua proses dari pra, pelaksanaan, serta pasca membutuhkan waktu yang sesuai dengan kebijakan dan program yang ada.

#### 2. Cakupan (luasnya publik).

Khalayak merupakan sasaran atau target pembentukan opini publik. Khalayak menerima pesan yang disampaikan oleh media berkaitan dengan komunikator politik sebagai informasi untuk melakukan interpretasi atas pesan yang disampaikan. Khalayak berjumlah besar, tidak terlalu teridentifikasi secara individu, namun mereka mempunyai keterkaitan personal mengenai sebuah isu. Semakin besar jumlah khalayak yang terbentuk menjadi public, semakin baik dan berhasil proses pembentukan opini public. Jumlah public yang besar menandakan

bahwa dukungan politik kuat dan berhasil menciptakan citra politik yang baik bagi komunikator politik.

### 3. Pengalaman masa lalu.

Khalayak/publik cenderung mempunyai pengalaman mengenai isu/berita yang menjadi pembicaraan. Semakin intensif hubungan antara khalayak/publik dan isu sebagai objek pembicaraan, semakin banyak persamaan pengalaman yang akan dirasakan oleh khalayak tersebut menjadi suatu konsesus. Khalayak/publik terikat dengan isu sesuai dengan pengalaman mereka.

#### **2.2.5 Media Massa Sebagai Pembentuk Opini Publik**

Salah satu proses komunikasi yang berkaitan dengan terbentuknya opini publik dalam proses politik adalah komunikasi massa dalam hal ini, media massa mentransformasikann pesan-pesan presiden, KPU, Partai Politik dan komunikator politik mengenai kebijakan proses politik.

Walter Lippman (Wahid 2016:159), mengungkapkan bahwa media memiliki peran dalam mendefinisikan dunia. Media memeanggang peranan sebagai mediator yang akan mempertemukan realitas dengan gambaran yang ada dalam pikiran atau dalam bahasa Lippman "*the World Outside and the Pictures in Our Head*". Menurut McComb istilah *agenda setting* sinonim dengan peran media massa dalam membentuk opini dan persepsi publik tentang isu-isu penting (Effendy, 2000:287)

Dalam upaya membangun citra dan opini publik yang positif, sebagai komunikator politik, para politikus selalu memandang bahwa pesan politik apapun yang disampaikan kepada khalayak melalui media massa pasti akan menumbulkan

efek yang positif. Itulah kenapa kegiatan kampanye politik atau sosialisasi politik dilakukan melalui pidato pada rapat umum atau media massa.

Banyak komunikator atau politikus yang menganggap bahwa efek dari opini publik dapat diramalkan, diciptakan, atau direayasa melalui perencanaan awal. Inilah pola lama yang sesungguhnya menempatkan khalayak pada posisi pasif, tidak berdaya, dan seperti botol kosong. Pada konteks sekarang ini, masyarakat cenderung mempunyai informasi dan pengetahuan mengenai aktor politik serta tindakan politik yang diperoleh dari media. Namun, bagaimana pun banyaknya informasi, khalayak selalu mempunyai kemungkinan untuk dipengaruhi oleh aktor politik, walau tidak semudah pada era dimana media belum semudah ini diakses oleh khalayak.

Bernard Hennessy (Wahid 2016:160), mengemukakan lima faktor pembentuk opini publik, yaitu:

- a) Adanya isu (*presence of an issue*). Harus terdapat konsensus yang sesungguhnya, opini publik berkumpul disekitar isu. Isu dapat didefinisikan sebagai suatu kontemporer yang didalamnya mungkin tidak terdapat kesepakatan atau kontroversi juga konflik kontemporer.
- b) Adanya kelompok yang dikenal dan berkepentingan terhadap isu (*nature of public*).
- c) Adanya pilihan yang sulit (*complex of preferences*) mengacu pada totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.

- d) Adanya suatu pernyataan atau opini (*expression of opinion*). Berbagai pernyataan bertumpuk sekitar isu. Pernyataan biasanya melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis.
- e) Adanya sejumlah orang yang terlibat (*number of persons involved*) publik adalah besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu.

### **2.2.6 Unsur-unsur opini publik**

Opini publik memiliki tiga unsur. Pertama, harus ada isu (peristiwa atau kata-kata) yang actual, penting menyangkut kepentingan pribadi. Kedua, harus ada sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut, yang kemudian menghasilkan kata sepakat mengenai sikap, pendapat dan pandangan mereka. Ketiga, selanjutnya pendapat mereka itu harus diekspresikan atau dinyatakan dalam bentuk lisan, tertulis, dan gerak-gerik (Chairina Husni, 2013).

#### **1. Keyakinan**

Kepercayaan terhadap sesuatu. Misalnya masyarakat akan percaya terhadap berita yang disampaikan oleh media massa.

#### **2. Sikap**

Apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang. misalnya masyarakat bersikap ingin tahu atau sebaliknya terhadap berita yang disampaikan oleh media massa.

#### **3. Persepsi**

Persepsi memberi makna pada sensasi ( apa yang ditangkap oleh alat indra ) sehingga manusia mendapatkan pengetahuan yang baru.

## **2.3 Komisi Pemilihan Umum**

### **2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat di seajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

## **2.4 Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota lembaga perwakilan, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dijabarkan kedalam beberapa undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang No.8 Tahun
- b. 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.15 Tahun 2011, disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur mengenai asas penyelenggara pemilu sebagai

pedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

#### **2.4.1 Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 di atas, dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yang substansinya mengatur mengenai sistem *electoral law*, *electoral process*, dan *law enforcement*.

Sistem *electoral law*, yang meliputi sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian



suara, metode penentuan pemenang, penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan. *Electoral process*, mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, *law enforcement* khusus mengenai pengawasan pemilu dan penegakan hukum, menurut hemat penulis sulit mencerminkan ke arah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

berdasarkan sistem Presidensial dengan *dukungan suara mayoritas pilihan rakyat* (Abdul Latief, 2009) :

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, penyelenggaraan Pemilu Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial.

Menurut Sulardi bahwa UUD 1945 bahwa salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Hal tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil yang baik, efektif dan efisien. Adapun konsep sistem pemerintahan presidensial murni itu memuat dua belas ciri, yaitu (Sulardi, 2012)

- a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
- b. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
- c. Masa Jabatan Presiden yang pasti
- d. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislaif
- f. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif
- g. Menteri tidak boleh merangkap anggota badan legislati
- h. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden
- i. Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan Presiden
- j. Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem *checks and balance*
- k. Pembuatan undang-undang oleh badan legislatif tanpa melibatkan lembaga eksekutif
- i. Hak veto Presiden terhadap Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.

(Saldi Isra, 2013). Dalam sistem presidensiil murni salah satu cirinya adalah Presiden

dipilih langsung oleh rakyat (Sulardi, 2012). Sehingga menurut UUD 1945, sistem presidensiil harus dibangun oleh mekanisme pemilihan langsung Presiden dan penyelenggaraannya secara serentak. Sistem pemilihan langsung adalah sebuah sistem yang menggantungkan stabilitas pemerintahan pada dukungan rakyat secara langsung (Abdul Latief, 2009), karena beberapa alasan (*raison d'etre*) yang sangat mendasar, yaitu:

1. Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil
2. pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan.
3. pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain.
4. pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam

penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* antara

Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat (Saldi Isra, 2009).

Satya Arinanto sebagaimana dikutip Abdul Latif mengemukakan sejumlah alasan diselenggarakannya

pemilihan presiden secara langsung yaitu: (Abdul Latief, 2009)

- a. Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung;
- b. Presiden terpilih tidak terkait pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya. Artinya presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut.

c. Sistem ini menjadi lebih “accountable” karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui pemilihan umum.

d. Kriteria calon presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat.

Menurut Satya Arinanto, dalam sistem pemilihan Presiden secara langsung dikenal beberapa

sistem yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan, yaitu:

a. *First Past the Post*, didasarkan pada suara terbanyak. Digunakan dalam konstitusi Mexico, Kenya, Filipina, Zambia, Korea Selatan, Malawi, Irlandia, Zimbabwe. Dalam pemilihan Presiden di Filipina May 1992 Fidel Ramos terpilih dari 7 kandidat dengan memenangkan 25% suara.

b. *Two Round System*, pemilihan dilaksanakan dua putaran jika dalam putaran pertama tidak ada seorang kandidat yang memperoleh suara mayoritas. Digunakan di konstitusi Amerika Serikat, Finlandia, Austria, Bulgaria, Portugal, Rusia, Polandia, Perancis. Di negara Afrika Selatan, Mali, Pantai Gading, Siera Leone, Namibia, dan Kongo.

c. *Preferential System*, dilakukan dengan memberikan preferensi pada kandidat. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolute, dihitung dengan cara preferensi. Sistem ini memungkinkan kandidat pada urutan bawah memenangkan pemilihan. Presiden Mary Robinson terpilih sebagai Presiden Irlandia 1990.

d. *Distribution Requirement*, cara yang diterapkan dengan menetapkan dukungan dari beberapa daerah yang dipersyaratkan. Di negara di samping memenangkan

pemilihan plural, harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari 31 propinsi.

#### **2.4.2 Pemilihan umum Serentak**

Di Indonesia saat ini, menggunakan sistem pemilu berkala, yaitu antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terpisah dengan pemilu presiden dan wakil presiden, ditambah dengan pemilu kepala daerah. Alasannya, menurut Assiddiqie, yaitu:

- a. perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen
- b. kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat merubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia international, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri
- c. meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat
- d. diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintah yang lebih baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga

Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

Putusan ini menarik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem pemilu di Indonesia melalui pengujian undang-undang. Perkembangan demokratisasi di Indonesia pasca reformasi memang telah melaju kencang, misalnya Pilpres langsung.

Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat

taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang.

Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Mahkamah Konstitusi bertujuan menata sistem pemilu lebih baik dan mampu melahirkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas, serta mampu menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak serentak) telah menyebabkan sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensiil keluar dari rel konstitusi, sehingga untuk mengembalikan hal tersebut pada sistem yang benar menurut konstitusi harus dengan membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam UU Pilpres yang mengatur hal tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Artinya pemilu yang tidak serentak menurut UU Pilpres tersebut bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Adapun argumentasi Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang No.42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 didasarkan pada tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

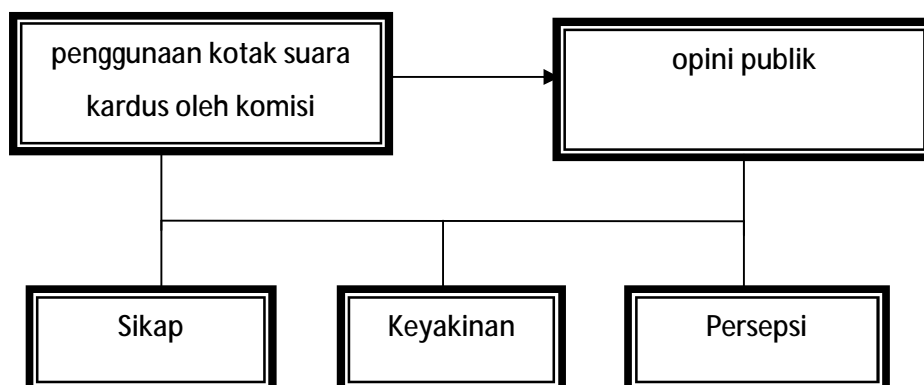
#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Selain itu, metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat, hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala, dan mencatat dalam buku observasinya (Rakhmat, 2004:4)

#### 3.2 Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian sebagai dasar jawaban sementara dari masalah yang di uji kebenarannya.

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar :I Kerangka Konsep

### 3.3 Defenisi Konsep

a. Opini publik

Opini publik adalah pernyataan dari sikap, opini publik dapat berubah-ubah dalam hal intensitas dan stabilitasnya. Dengan mengacu pada interpretasi dalam bahasa Inggris dan Perancis terhadap kata opini, Noelle Neuman menyatakan bahwa opini adalah derajat persetujuan atau kesepakatan dari suatu masyarakat tertentu. (Morissan, 2013:526)

b. Kotak suara

Kotak suara adalah kotak dalam pemilihan calon pemimpin negara atau daerah sebagai tempat memasukkan lembaran yang sudah diisi oleh pemilih.

c. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

d. Keyakinan

Kepercayaan terhadap sesuatu dalam hal ini adalah kepercayaan terhadap keamanan surat suara yang disimpan didalam kotak suara yang terbuat dari kardus. Misalnya masyarakat akan percaya terhadap berita yang disampaikan oleh media massa.

e. Sikap

Apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang, sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah perasaan suka atau tidak suka terhadap penggunaan kotak suara yang terbuat dari kardus yang digunakan untuk menyimpan surat suara. misalnya masyarakat bersikap ingin tahu atau sebaliknya terhadap berita yang disampaikan oleh media massa.

f. Persepsi

Persepsi yakni penilaian terhadap kotak suara kardus sebagai tempat menyimpan surat suara. memberi makna pada sensasi (apa yang yang dianggap baru oleh masyarakat) sehingga akan mendapatkan pengetahuan yang baru.

### 3.4 Operasionalisasi Konsep

Variabel penelitian	Indikator
Opini masyarakat tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum.	1. Keyakinan
	2. Sikap
	3. Persepsi

Tabel : 1 Operasionalisasi Konsep

### 3.5 Populasi dan sampel

#### 1. populasi

Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian ini, kata populasi sangat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.

Begitu pula dengan bungin yang berpendapat bahwa populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Sugiono, 2014 : 88)

jadi, populasi merupakan keseluruhan objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus ( Arikunto, 2006 : 110 ). Berdasarkan penjelasan diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat tanjung mulia kecamatan medan deli.

### **1. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ( Sugiono, 2014: 81 ). Dalam teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik pendekatan *simple random sampling* ( SRS ). Sugiyono (2014 : 82) menjelaskan bahwa “ *simple random sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak”.

Menurut arikunto (2006 : 112) mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil untuk tingkat kesalahan antara 10-15% atau 15-25% atau lebih. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

keterangan :

N = ukuran populasi

n = ukuran sampel minimal

e = persen kesalahan pengambilan sampel = 10% (0,1)

perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

$$n = \frac{1,290}{1,290 \cdot 0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{1,290}{1,290 \cdot 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{1,290}{12,9 + 1}$$

$$n = \frac{1,290}{13,9}$$

$$n = 93$$

Jadi masyarakat yang menjadi sampel pada penelitian mewakili populasi adalah 93 orang.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara ( sugiyono, 2014:137 )

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan ( *Observasi* )

Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat dengan masalah yang dihadapi.

2. Angket ( *Kuesioner* )

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan oleh responden, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data obyektif dan cepat. (Sugiyono, 2010 : 142).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden , atau sumber yang lainnya terkumpul (sugiyono, 2017 :147). Penelitian menggunakan analisis tabel tunggal yaitu suatu analisa penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan penelitian kedalam jumlah frekuensi dan persentase.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan XII Tanjung Mulia kecamatan medan deli. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2019.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

##### **4.1.1 Penyajian Data**

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, maka diperoleh berbagai data tentang responden dalam kaitannya dengan opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum pada masyarakat tanjung mulia kecamatan medan deli.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat usia 17 tahun yang menjadi pemilih pemula pada pemilihan umum, Semua responden diberi angket yang berisi 15 pernyataan. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk analisa dengan bentuk tabel tunggal dengan jumlah responden sebanyak 93 orang.

Dari pernyataan yang diajukan kepada responden dan hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut :

##### **4.1.2 Identitas Responden**

Adapun identitas yang dianggap relevan menurut penelitian ini meliputi nama, jenis kelamin, dan usia.

**Tabel 4.1**  
**Distribusi responden menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	48	51,61
2	Perempuan	45	48,38
3	Jumlah	93	100

Sumber : hasil penelitian

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa dari 93 yang menjadi responden terdapat 48 orang atau 51,61% berjenis kelamin laki-laki dan 45 orang atau 48,38% berjenis kelamin perempuan.

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 48 orang atau 51,61%. Hal ini berarti didominasi oleh masyarakat laki-laki.

**Tabel 4.2**  
**Penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus dinilai cukup memuaskan.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	18	19,35
2	Setuju	15	16,12
3	Kurang Setuju	36	38,70
4	Tidak Setuju	24	25,80
	Jumlah	93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 19,35% dengan frekuensi 18 orang sangat setuju jika kotak suara berbahan dasar



kardus dinilai cukup memuaskan. 16,12% dengan frekuensi 15 orang setuju bahwa kotak suara berbahan dasar kardus dinilai cukup memuaskan. 38,70% dengan frekuensi 36 orang kurang setuju kotak suara berbahan dasar kardus dinilai cukup memuaskan. 25,80% dengan frekuensi 24 orang tidak setuju dengan kotak suara berbahan dasar kardus dinilai yang cukup memuaskan.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan masyarakat yang kurang setuju dengan penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus yang dinilai sudah cukup memuaskan.

**Tabel 4.3**  
**Kotak suara kardus sudah dianggap layak oleh masyarakat.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	14	15
2	Setuju	11	11,82
3	Kurang Setuju	28	30,10
4	Tidak Setuju	40	43
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 15% dengan frekuensi 14 orang menyatakan sangat setuju dengan kelayakan kotak suara berbahan dasar kardus. 11,82% dengan frekuensi 11 orang setuju bahwa kotak suara kardus sudah dianggap layak oleh masyarakat. 30.10% dengan frekuensi 28 orang kurang setuju dengan kotak suara kardus sudah dianggap layak oleh masyarakat. Dan sebanyak 43% dengan frekuensi 40 orang menyatakan bahwa tidak setuju dengan kotak suara kardus sudah dianggap layak oleh masyarakat.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa lebih banyak responden yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan kotak suara kardus sudah dianggap layak oleh masyarakat.

**Tabel 4.4**  
**Kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	5,37
2	Setuju	14	15
3	Kurang Setuju	33	35,48
4	Tidak Setuju	41	41,44
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 5,37% dengan frekuensi 5 orang sangat setuju dengan kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan. 15% dengan frekuensi 14 orang setuju dengan kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan. Kemudian 35,48% dengan frekuensi 33 orang kurang setuju dengan kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan. Dan 41.44 dengan frekuensi 41 orang menyatakan bahwa tidak setuju dengan kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan responden tidak setuju kalau kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan.

**Tabel 4.5**  
**Penggunaan kotak suara kardus dinilai sudah cukup aman.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	6	6,45
2	Setuju	23	24,73
3	Kurang Setuju	36	38,70
4	Tidak Setuju	28	20,10
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 6,45% dengan frekuensi 6 orang sangat setuju dengan penggunaan kotak suara kardus yang dinilai sudah cukup aman. 24,73% dengan frekuensi 23 orang menyatakan setuju dengan penggunaan kotak suara kardus yang dinilai sudah cukup aman. Lalu ada 38,70% dengan frekuensi 36 orang kurang setuju dengan penggunaan kotak suara kardus dinilai sudah cukup aman. Terakhir 20,10% dengan frekuensi 28 orang menyatakan tidak setuju dengan penggunaan kotak suara kardus dinilai sudah cukup aman.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa banyak responden yang kurang setuju dengan penggunaan kotak suara kardus dinilai sudah cukup aman.

**Tabel 4.6**  
**Kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap air.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	5,37
2	Setuju	25	26,88
3	Kurang Setuju	20	21,50
4	Tidak Setuju	43	46,23
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 5,37% dengan frekuensi 5 orang sangat setuju dengan kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap air. 26,88% dengan frekuensi 25 orang menyatakan setuju dengan kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap air. Kemudian ada 21,50 dengan frekuensi 20 orang kurang setuju dengan kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap air. Dan sebanyak 46,23% dengan frekuensi 43 orang menyatakan tidak setuju dengan kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap suara.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan responden tidak setuju dengan kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap air.

**Tabel 4.7**  
**Penggunaan kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	36	38,70
2	Setuju	36	38,70
3	Kurang Setuju	18	19,35
4	Tidak Setuju	3	3,22
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 38,70% dengan frekuensi 36 orang sangat setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi. Dan 38,70% dengan frekuensi 36 orang juga menyatakan setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi. 19,35% dengan frekuensi 18 orang kurang setuju dengan penggunaan

kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi. Dan sisanya ada 3.22% dengan frekuensi 3 orang yang menyatakan tidak setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa responden sangat setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi.

**Tabel 4.8**  
**Kotak suara kardus tidak berkualitas.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	35	37,63
2	Setuju	26	27,95
3	Kurang Setuju	20	21,50
4	Tidak Setuju	12	12,90
	Jumlah	93	100

Sumber : Hasil Penelitian.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 37,63% dengan frekuensi 35 orang sangat setuju dengan kotak suara kardus tidak berkualitas. 27,95% dengan frekuensi 26 orang menyatakan setuju dengan kotak suara kardus tidak berkualitas. Kemudian ada 21,50% dengan frekuensi 20 orang kurang setuju dengan kotak suara kardus tidak berkualitas .12,90 dengan frekuensi 12 orang tidak setuju dengan kotak suara kardus tidak berkualitas

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kebanyakan dari responden menyatakan sangat setuju dengan kotak suara kardus tidak berkualitas.

**Tabel 4.9**  
**Penggunaan kotak suara kardus berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	21	22,58
2	Setuju	55	59,13
3	Kurang Setuju	9	9,67
4	Tidak Setuju	8	8,60
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 22,58% dengan frekuensi 21 orang sangat setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sebanyak 59,13% dengan frekuensi 55 orang menyatakan setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat. 9.67% dengan frekuensi 9 orang kurang setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sisanya ada 8,60% dengan frekuensi 8 orang tidak setuju dengan penggunaan kotak suara kardus berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Berdasarkan data tersebut maka diketahui bahwa sangat banyak responden yang setuju penggunaan kotak suara kardus berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat.

**Tabel 4.10**  
**Komisi pemilihan umum telah memaksimalkan kinerja mereka pada pemilihan umum 2019.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	17	18,27
2	Setuju	26	27,95
3	Kurang Setuju	42	45,16
4	Tidak Setuju	8	8,60
	Jumlah	93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 18,27% dengan frekuensi 17 orang sangat setuju bahwa komisi pemilihan umum telah memaksimalkan kinerja mereka pada pemilihan umum 2019. 27,95% dengan frekuensi 26 orang menyatakan setuju dengan komisi pemilihan umum telah memaksimalkan kinerja mereka pada pemilihan umum 2019. Kemudian 45,16% dengan frekuensi 42 orang menyatakan kurang setuju komisi pemilihan umum telah memaksimalkan kinerja mereka pada pemilihan umum 2019. Terakhir ada 8,60% dengan frekuensi 8 orang yang menyatakan tidak setuju dengan komisi pemilihan umum telah memaksimalkan kinerja mereka pada pemilihan umum 2019.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kebanyakan responden kurang setuju kepada komisi pemilihan umum yang telah memaksimalkan kinerja mereka pada pemilihan umum 2019.

**Tabel 4.11**  
**Penggunaan kotak suara kardus tidak menurunkan derajat kualitas komisi pemilihan umum.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	14	16,12
2	Setuju	34	36,55
3	Kurang Setuju	32	34,40
4	Tidak Setuju	12	12,90
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa ada 16,12% dengan frekuensi 14 orang yang menyatakan sangat setuju dengan penggunaan kotak suara kardus tidak menurunkan derajat kualitas komisi pemilihan umum. Dan sebanyak 36,55% dengan frekuensi 34 orang setuju dengan penggunaan kotak suara kardus tidak menurunkan derajat kualitas komisi pemilihan umum. Namun ada juga 34,40% dengan frekuensi 32 orang yang menyatakan kurang setuju dengan penggunaan kotak suara kardus tidak menurunkan derajat kualitas komisi pemilihan umum. Dan ada 12,90% dengan frekuensi 12 orang tidak setuju penggunaan kotak suara kardus tidak menurunkan derajat komisi pemilihan umum.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa banyak dari responden yang setuju dan menyatakan bahwa penggunaan kotak suara kardus tidak menurunkan derajat kualitas komisi pemilihan umum.



**Tabel 4.12**  
**Penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	8	8,60
2	Setuju	24	25,80
3	Kurang Setuju	38	40,86
4	Tidak Setuju	22	23,65
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 8,60% dengan frekuensi 8 orang setuju penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu. 25,80% dengan frekuensi 24 orang menyatakan setuju dengan penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu. Dan sebanyak 40,86% dengan frekuensi 38 orang menyatakan kurang setuju terhadap penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu. 23,65% dengan frekuensi 22 orang tidak setuju dengan penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak dari responden yang merasa kurang setuju dengan penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu.

**Tabel 4.13**  
**Kotak suara berbahan dasar kardus dapat**  
**digunakan untuk jangka panjang.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	3	3,22
2	Setuju	4	4,30
3	Kurang Setuju	27	29,03
4	Tidak Setuju	59	63,44
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 3,22% dengan frekuensi 3 orang responden menyatakan sangat setuju dengan kotak suara berbahan dasar kardus dapat digunakan untuk jangka panjang. 4,30% dengan frekuensi 4 orang menyatakan setuju dengan kotak suara berbahan dasar kardus dapat digunakan untuk jangka panjang. Kemudian ada 29.03% dengan frekuensi 27 orang yang berpendapat bahwa kurang setuju jika kotak suara berbahan dasar kardus dapat digunakan untuk jangka panjang. Terakhir ada sebanyak 63,44% dengan frekuensi 59 orang responden yang menyatakan tidak setuju dengan kotak suara berbahan dasar kardus dapat digunakan untuk jangka panjang.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sangat banyak responden yang tidak setuju dengan kotak suara berbahan dasar kardus dapat digunakan untuk jangka panjang.

**Tabel 4.14**  
**sebaiknya kembali menggunakan kotak**  
**suara berbahan dasar aluminium.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	55	59,13
2	Setuju	28	30,10
3	Kurang Setuju	8	8,60
4	Tidak Setuju	2	2,15
	Jumlah	93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa sebanyak 59,13% dengan frekuensi 55 orang sangat setuju kalau sebaiknya kembali menggunakan kotak suara berbahan dasar aluminium. 30,10% dengan frekuensi 28 orang juga menyatakan setuju jika sebaiknya kembali menggunakan kotak suara berbahan dasar aluminium. Ada juga 8,60% dengan frekuensi 8 orang responden yang kurang setuju kalau sebaiknya kembali menggunakan kotak suara berbahan dasar aluminium. Sisanya ada 2,15% dengan frekuensi 2 orang yang tidak setuju jika kembali menggunakan kotak suara berbahan dasar aluminium.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih banyak masyarakat yang sangat setuju jika kembali menggunakan kotak suara berbahan dasar aluminium.

**Tabel 4.15**  
**Pemerintah terlalu membatasi hak suara dalam memilih kotak suara.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	16	17,20
2	Setuju	53	56,98
3	Kurang Setuju	17	18,27
4	Tidak Setuju	7	7,52
Jumlah		93	100

Sumber : hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa ada 17,20% dengan frekuensi a6 orang yang menyatakan sangat setuju bahwa pemerintah terlalu membatasi hak suara masyarakat dalam memilih kotak suara. Dan sebanyak 56,98% dengan frekuensi 53 orang responden setuju kalau pemerintah terlalu membatasi hak suara masyarakat dalam memilih kotak suara. Namun ada juga 18,27% dengan frekuensi 17 orang yang menyatakan kurang setuju kalau pemerintah terlalu membatasi hak suara masyarakat dalam memilih kotak suara. Terakhir 7,52% dengan frekuensi 7 orang menyatakan tidak setuju bahwasanya pemerintah terlalu membatasi hak suara masyarakat dalam memilih kotak suara.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahu bahwa sangat banyak responden yang setuju kalau pemerintah terlalu membatasi hak suara masyarakat dalam memilih kotak suara.

**Tabel 4.16**  
**Pemilihan kotak suara kardus dilatar belakang**  
**oleh kepentingan salah satu golongan.**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	15	16,12
2	Setuju	46	49,46
3	Kurang Setuju	14	15,05
4	Tidak Setuju	18	19,35
Jumlah		93	100

Sumber : Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah 93 responden dapat diketahui bahwa 16,12% dengan frekuensi 15 orang menyatakan sangat setuju dengan pemilihan kotak suara kardus dilatar belakang oleh kepentingan salah satu golongan. Dan sebanyak 49,46% dengan frekuensi 46 orang setuju jika pemilihan kotak suara kardus dilatar belakang oleh kepentingan salah satu golongan. Kemudian ada juga 15,05% dengan frekuensi 15 orang responden yang menyatakan kurang setuju jika pemilihan kotak suara kardus dilatar belakang oleh kepentingan salah satu golongan. Dan sisanya ada 19,35% dengan frekuensi 18 orang yang tidak setuju kalau pemilihan kotak suara kardus dilatar belakang oleh kepentingan salah satu golongan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang merasa setuju dengan menyatakan bahwa pemilihan kotak suara berbahan dasar kardus dilatar belakang oleh kepentingan salah satu golongan.

## 4.2 Pembahasan

Bagian ini membahas opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum. ada beberapa indikator yang dimasukkan dalam kuesioner yaitu sikap, keyakinan, dan persepsi. Dalam hal ini yang akan di simpulkan adalah opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum.

Dalam melaksanakan sebuah acara pemilihan umum perlu sebuah indikator yang menjadi hal penting untuk menjadi lebih baik lagi agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat keberhasilan sebuah pesta demokrasi yaitu melihat bagaimana opini atau pendapat masyarakat mengenai adanya hal baru yang ada didalam pemilihan umum tersebut.

Opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum ini dilakukan pada masyarakat Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli. Dalam opini publik tersebut meliputi keyakinan yaitu keamanan kotak suara, sikap yaitu menerima atau tidaknya kotak suara berbahan dasar kardus sebagai alat untuk menampung surat suara, persepsi yaitu kotak suara yang efisien.

Berdasarkan data dari tabel tunggal diatas dapat disimpulkan bahwa pergantian kotak suara berbahan dasar aluminium ke kotak suara berbahan dasar kardus memang memberikan efek positif dan negatif bagi masyarakat terutama pada pemilih pemula, Didalam penelitian ini dapat dilihat dimana responden yang paling banyak adalah laki laki dari pengisian kuesioner.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.2 mayoritas responden menjawab kurang setuju untuk pernyataan penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus dinilai cukup memuaskan. ini karena masyarakat dapat melihat dengan cukup jelas bahwasanya penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus itu belum cukup memuaskan untuk digunakan dalam pemilihan umum.

Sama seperti yang terlihat pada tabel 4.3 dimana masyarakat banyak menjawab tidak setuju dengan kotak suara kardus yang dianggap sudah cukup layak oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan masyarakat banyak yang menganggap penggunaan kotak suara yang digunakan dalam menimbulkan kecurangan pada saat pemilihan umum, dapat dilihat juga pada tabel 4.4 yang dimana mayoritas masyarakat mengatakan kurang setuju dengan kualitas kotak suara tahan terhadap tekanan. Hal itu karena kotak suara berbahan dasar kardus belum dinilai layak terhadap tekanan, hasil tabel 4.5 menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat kurang setuju dengan penggunaan kotak suara dinilai sudah cukup aman. Hal itu pun didukung oleh berita mengenai kecurangan dalam pemilihan umum, bisa dilihat juga pada tabel 4.6 dimana hampir dari seluruh responden menjawab tidak setuju dengan kualitas kotak suara berbahan dasar kardus kedap air.

Pada tabel 4.7 mayoritas menjawab pernyataan sangat setuju penggunaan kotak suara kardus berpotensi untuk dicurangi. Karena adanya berita yang disaksikan oleh masyarakat mengenai kecurangan dalam pemilihan umum, menurut tabel 4.8 kebanyakan responden menjawab sangat setuju bahwa kotak suara kardus tidak berkualitas. Hal ini juga bisa dilihat pada tabel 4.9 yang dimana responden menjawab setuju jika memang penggunaan kotak suara berbahan dasar

kardus berpotensi menimbulkan perdebatan dimasyarakat. Hal ini bisa dilihat karena adanya masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan adanya penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus tersebut. Menurut tabel 4.10 mayoritas responden menjawab kurang setuju dengan kinerja komisi pemilihan umum pada tahun 2019 karena dianggap kurang baik dalam menjalankan tugas. Hal ini juga membuat masyarakat mengharapkan bahwa pemerintah harus lebih mmeperdulikan hak suara masyarakat agar tidak menurunkan derajat kualitas komisi pemilihan umum hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11.

Menurut tabel 4.12 mayoritas responden menjawab kurang setuju dengan pernyataan penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut pemilu, hal ini dikarenakan dengan tidak puasny masyarakat dengan kotak suara berbahan kardus yang digunakan untuk menampung surat suara. Bisa dilihat juga pada tabel 4.13 yang dimana masyarakat juga kebanyakan menjawab tidak setuju jika kotak suara suara bernahan dasar kardus tersebut dapat digunakan untuk jangka panjang karena kotak suara tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sebagai tempat menampung surat suara dan banyak juga berita yang menyatakan bahwa ada beberapa kotak suara di beberapa wilayah di indonesia yang rusak dan tidak layak pakai.

Pada tabel 4.14 mayoritas responden menyatakan sangat setuju jika sebaiknya kembali menggunakan kotak suara berbahan dasar aluminium, hal ini karena masyarakat merasa yakin dengan rendahnya tingkat kecurangan dalam pemilihan umum jika menggunakan kotak suara yang lebih layak dan tahan terhdap tekanan serta tahan terhadap air. Menurut tabel 4.15 kebanyakan



masyarakat menjawab setuju dengan pemerintah yang terlalu membatasi hak suara masyarakat dalam memilih kotak suara. Menurut tabel 4.16 responden menjawab setuju jika penggunaan kotak suara yang dilatar belakangi dengan kepentingan salah satu golongan , hal ini karena terlalu banyaknya berita yang membahas tentang kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan umum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus berdampak kurang baik bagi masyarakat, komisi pemilihan umum dan pemerintahan.

Hasil analisis menjawab bahwa opini publik tentang penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus oleh komisi pemilihan umum berpengaruh dan bermanfaat sesuai dengan hasil jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan peneliti oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil analisis data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti akan memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan skripsi ini dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan kotak suara dari kardus pada pemilihan umum 2019 menimbulkan opini masyarakat .
2. Penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan presiden 2019 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
3. Opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus pada pemilihan umum 2019 cenderung negatif.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh pada opini publik tentang penggunaan kotak suara kardus oleh komisi pemilihan umum, pada masyarakat tanjung mulia kecamatan medan deli.

Dikemukakan saran- saran sebagai berikut :

1. Hendaknya komisi pemilihan umum tidak menggunakan kotak suara kardus pada pemilihan umum yang akan datang.

2. Hendaknya komisi pemilihan umum dapat meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan kotak suara kardus pada pemilihan presiden 2019 dapat menjamin keamanan surat suara.
3. Hendaknya masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada komisi pemilihan umum dalam hal pengamanan kotak suara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Latief. 2009. Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai: Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3. September 2009
- Arifin, Anwar. 2010. *Opini Publik Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cangara, hafied.2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, deddy. 2011. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Jakarta : Kencana.
- Nurudin. 2008. *Hubungan Media Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Saldi, isra. 2013. Hubungan Presiden dan DPR: Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- , 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulardi. 2012. Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni: Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Sumber internet :

Nur, fatin. 2015. Seputarpengertianblogspot.Com

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1190/1251>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Vinkan Dwi Agustin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 02 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Alumunium 1 Ling. XII Tanjung Mulia Medan  
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Razali  
Nama Ibu : Awaliati  
Alamat : Jln. Alumunium 1 Ling. XII Tanjung Mulia Medan

### **Pendidikan Formal**

2003-2009 : SD Negeri 060861 Medan  
2009-2012 : SMP Swasta Yos Sudarso Medan  
2012-2015 : SMK Negeri 8 Medan  
2015-2019 : S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2019

**Vinkan Dwi Agustin**